

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan secara terdesentralisasi dimulai pada bulan Januari 2001. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa tujuan desentralisasi pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Konsekuensi atas pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, pemerintah daerah dipacu untuk mandiri dengan mengerahkan segala potensi yang ada di daerah masing – masing dan mampu memberikan pelayanan atas segala kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Chapra (2001), beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah : (1) perlunya pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah dihadapan rakyat guna memotivasi aparat pemerintah dalam menunaikan tugas – tugasnya bagi kesejahteraan rakyat. (2) kurangnya pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah perlahan – lahan akan memunculkan penyakit yang dapat merusak keadilan dan pembangunan. (3) otoritas kebijakan yang memaksakan kehendak pribadi atas rakyatnya dapat menimbulkan rusaknya hubungan dan solidaritas antara pemerintah dengan masyarakat. (4) saat kepentingan rakyat diabaikan, maka akan menyebabkan pemerintahan yang lebih

Kondisi kekayaan masing – masing pemerintah daerah tidaklah sama dalam mencapai tujuan desentralisasi, akan tetapi semua pemerintah daerah ada kesamaan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha peningkatan PAD ini menuntut peran inisiatif dan inovasi pemerintah daerah selaku pengayom dan penggerak masyarakat, sehingga dengan adanya PAD ini tidak menyebabkan masyarakat semakin tertekan dan tidak menghambat aktivitas ekonomi termasuk lalu lintas barang dan jasa.

Menurut Donelly dalam Mardiasmo (2004), pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dari hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakat.

Upaya pemerataan pembangunan dan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui desentralisasi, perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan agar segala potensi daerah dapat berkembang dan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

Menurut Chapra (2001) kontrol atas keuangan publik sangatlah penting. Tanpa adanya pertanggungjawaban atas keuangan publik akan merusak penerapan konsep pengawasan dan penyeimbangan tentang sumber – sumber kekayaan publik. Mardiasmo (2004) menambahkan bahwa salah satu aspek dari

... adalah masalah

diharapkan akan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat daerah jika dibandingkan dengan pengaturan pemerintahan secara terpusat.

World Bank (*Indonesia, Constructing*) dalam Adil Khan (2005), menyatakan bahwa, persoalan kemiskinan berkaitan dengan ide politik dan sosial yang merefleksikan harapan – harapan dan aspirasi masyarakat. Jika masyarakat seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan, memberikan pendidikan yang layak pada anak-anak, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mempunyai pekerjaan, maka bila sebagian masyarakat tidak mampu melakukan hal tersebut atau tidak mendapatkan pelayanan yang selayaknya mereka dapatkan, kondisi ini menunjukkan adanya kemiskinan. Gambaran lainnya seperti, jika semua masyarakat seharusnya mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi jika sebagian diantaranya tidak dapat atau tidak diikutsertakan, maka hal ini menunjukkan pula adanya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi tidak tercapainya suatu standar kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat, sehingga perlu dihapuskan.

Peninjauan atas kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan desentralisasi. Mengkaji kinerja keuangan daerah saja ternyata tidak cukup, bisa jadi pemerintah daerah menetapkan berbagai pungutan pajak daerah dan retribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan dampak atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah faktor pertumbuhan ekonomi

dimana pemerataan masyarakat belum tentu sepenuhnya merata dan mencerminkan penurunan tingkat kemiskinan.

Beberapa hal yang patut ditelaah dalam pengelolaan pemerintahan desentralisasi ini adalah bagaimana pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) pun perlu diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan karena sebagai bagian dari perimbangan keuangan.

Keaadaan ini sangat perlu dan mendorong peneliti untuk mengkaji pengaruh antara PAD dan DAU terhadap tingkat kemiskinan masyarakat sebagai sebuah cerminan atas keseimbangan dan kemanfaatan desentralisasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan
2. Pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan
3. Bagaimana pengaruh PAD dan DAU secara bersama - sama terhadap tingkat kemiskinan

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang teoritis

Mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan bagi pembaca dan memberi kontribusi literatur dibidang akuntansi sektor publik

2. Bidang praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada upaya menekan tingkat kemiskinan pada pemerintah daerah di Jawa Barat